

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk mengejar adanya pertumbuhan ekonomi, salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh negara yang sedang berkembang adalah adanya keterbatasan dana pembangunan di dalam negeri. Kondisi perekonomian Indonesia, seperti halnya kondisi negara sedang berkembang lainnya di dunia, mencerminkan bahwa sumber dana yang berasal dari dalam negeri belum sepenuhnya mampu diandalkan untuk membiayai kegiatan pembangunan karena jumlahnya terbatas. Salah satu bentuk sumber dana yang diharapkan dapat menutupi kekurangan sumber dana dalam negeri adalah melalui hutang luar negeri.

Pada intinya, sebenarnya hutang luar negeri membawa dua implikasi diantaranya, yaitu:

1. Hutang luar negeri merupakan pelengkap akumulasi modal yang digunakan untuk meningkatkan investasi sehingga pertumbuhan pendapatan nasional meningkat.
2. Pembayaran bunga dan cicilan hutang di kemudian hari akan mengurangi pendapatan nasional.

Meningkatnya peranan hutang luar negeri yang relatif pesat pada hakekatnya disebabkan karena melunaknya kemampuan pembiayaan pembangunan yang berasal dari penerimaan dalam negeri.¹⁾

Sejak Indonesia mengalami krisis, pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijakan, baik fiskal, moneter, perdagangan Internasional maupun kebijakan di sektor riil untuk mengatasinya. Namun ketidakstabilan politik dan berbagai masalah sosial yang terjadi di tanah air membuat upaya pemulihan tersebut menjadi lebih sulit. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia berawal dari depresiasi rupiah yang berlebihan diikuti dengan peningkatan harga-harga secara tajam. Dengan jumlah hutang luar negeri dunia usaha dan perbankan yang cukup besar dari pengelolaannya yang tidak hati-hati, yaitu penggunaan pinjaman jangka pendek untuk investasi jangka panjang dan mengabaikan resiko pergerakan kurs (*unhedged*), depresiasi rupiah yang berlebihan telah membawa dampak negatif bagi kinerja dunia usaha perbankan.

Selain itu, dilihat dari perkembangan Hutang Luar Negeri Indonesia sepuluh tahun terakhir (1992 - 2001) sangat meningkat sekali. Hal ini berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian, dapat dilihat dalam tabel 1.1.

¹⁾ Nota Keuangan dan APBN tahun anggaran 1996/1997 Republik Indonesia

Tabel 1.1
Perkembangan Hutang luar negeri Indonesia
Sepuluh tahun terakhir (1992-2001)

Tahun	Hutang Luar Negeri Indonesia (Milyar Rp)	Perkembangan (%) *
1992	13.182,5	-
1993	14.942,0	13,34
1994	17.167,1	14,89
1995	17.652,3	2,82
1996	20.489,0	16,06
1997	22.120,8	7,96
1998	19.236,7	-13,03
1999	64.296,3	234,23
2000	44.430,8	-30,89
2001	21.609,3	-35,49

Sumber: Nota Keuangan Indonesia
*Data Olahan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perkembangan Hutang luar negeri pada tahun 1998 persentasenya menurun sebesar -13,03% dan pada tahun 1999 persentasenya meningkat sebesar 234,23%.

Selama periode 1980 – 1993 sektor pemerintah Indonesia telah melakukan pembayaran cicilan hutang luar negeri sebesar US\$ 41,4 milyar. Sementara itu selama periode yang sama, sektor pemerintah telah menambah hutang luar negeri sebesar US\$ 69,4 milyar (World Bank, 1994). Dilaporkan bahwa sampai April 1999 hutang luar negeri sektor pemerintah telah meningkat menjadi US\$ 77,7 milyar. Ini secara implisit mengandung pengertian yang disebutkan diatas yaitu makin banyak cicilan hutang luar

negeri makin besar nilai hutang luar negeri yang menumpuk. Nilai net transfer keluar negeri yang dilakukan sektor pemerintah selama periode 1985 – 1993 misalnya adalah sebesar US\$ 7,8 milyar dan selama periode 1994 – 1998 diperkirakan sebesar US\$ 19 milyar (World Bank, 1994 dan World Bank, 1997).²⁾

Kenyataan ini menunjukkan bahwa negara kita masih belum mampu untuk menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pada umumnya negara yang sedang berkembang selalu menghadapi kendala yang tidak berujung pangkal atau yang biasa disebut dengan lingkaran setan (*vicious circle*), dimana kelangkaan sumber dana disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi. Rendahnya tingkat investasi disebabkan oleh rendahnya tingkat tabungan. Rendahnya tingkat tabungan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan. Sedangkan terjadinya tingkat pendapatan yang rendah disebabkan oleh rendahnya produktivitas dan sumber dana disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi dan seterusnya.

Semakin meningkatnya dana untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri memberikan suatu peringatan mengenai perlunya dilakukan pengelolaan hutang luar negeri secara cermat sehingga tidak menjadi beban yang berat di masa yang akan datang. Dalam hal ini pemerintah berusaha agar dana pinjaman tersebut dimanfaatkan secara efektif dan efisien bagi pembiayaan kegiatan-kegiatan ekonomi, yaitu untuk membangun proyek-proyek yang memiliki prioritas tinggi dan berkaitan

²⁾ Sri, Edi Swasono dan Sritua Arlef, "Seminar Pembangunan Nasional dengan tema: *Memaju Pembangunan Tanpa Hutang*" oleh FE-UII Yogyakarta, 1 Desember 1999.

dengan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan proyek-proyek produktif yang berorientasi ekspor. Ini dimaksudkan agar proyek-proyek tersebut dapat mendorong kemampuan membayar kembali pinjaman yang telah digunakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh mengenai permasalahan hutang luar negeri Indonesia. Sehubungan dengan hal itu maka penulis mengambil judul: **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH DI INDONESIA KURUN WAKTU 1983 – 2001.**

1.2. Perumusan Masalah

Sejak awal pembangunan, Indonesia dihadapkan pada kendala akan keterbatasan dana. Hal ini disebabkan keadaan yang belum stabil setelah kemerdekaan serta belum tergalinya potensi-potensi yang kita miliki untuk menunjang pendanaan.

Mengingat begitu luasnya bahasan yang menjadi topik penelitian dan berbagai keterbatasan yang menjadi kendala kesempurnaan penelitian ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan melihat peranan dan dampak yang ditimbulkan oleh hutang luar negeri.

Dalam perumusan masalah yang berkaitan dengan hutang luar negeri Indonesia, penulis merumuskan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Apakah faktor tabungan pemerintah, pengeluaran pembangunan, penerimaan minyak bumi dan gas serta kurs rupiah terhadap dolar akan mempengaruhi hutang luar negeri Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh faktor tabungan pemerintah, pengeluaran pembangunan, penerimaan minyak bumi dan gas, kurs rupiah terhadap dolar, terhadap hutang luar negeri Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh dan dampak keberadaan hutang luar negeri berkaitan dengan perekonomian nasional. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah faktor tabungan pemerintah, pengeluaran pembangunan, penerimaan minyak bumi dan gas, serta kurs rupiah terhadap dolar, akan mempengaruhi hutang luar negeri Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor tabungan pemerintah, pengeluaran pembangunan, penerimaan minyak bumi dan gas serta kurs rupiah terhadap dolar, terhadap hutang luar negeri Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjadi bahan pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya untuk mengetahui tentang permasalahan hutang luar negeri yang terjadi di Indonesia.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak atau instansi terkait yang nantinya dapat dipakai sebagai pertimbangan di dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan hutang luar negeri.
3. Sebagai bahan yang mampu memperkaya penelitian yang telah ada sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti yang akan datang.
4. Bagi penulis untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana, dan untuk mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hutang luar negeri di Indonesia.

1.5. Kajian Teoritis

Manfaat bantuan luar negeri selama pembangunan memang terasa memberi dampak kemajuan melihat hasil-hasil yang telah dicapai akhir-akhir ini. Tetapi melihat perkembangan hutang luar negeri sekarang ini dilihat dari sudut pandang ekonomi sudah memasuki masa-masa kritis. Potensi pendanaan dari dalam negeri sudah harus mulai digalakkan. Salah satu sumber pembiayaan dalam negeri yang memiliki potensi adalah melalui tabungan pemerintah. Pembentukan tabungan pemerintah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dipengaruhi oleh perkembangan penerimaan dalam negeri dan perencanaan alokasi pengeluaran rutin. Bila

dilihat dari teori kesenjangan antara tabungan dan investasi (*resource gap*) terjadi defisit terhadap sumber pembiayaan pembangunan karena tingkat tabungan lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan untuk investasi dibiayai dengan tabungan pemerintah. Karena belum tercukupi, maka ditutup dengan pinjaman atau hutang.

Dalam kaitan ini, penerimaan dalam negeri diupayakan dengan meningkatkan penerimaan baik di sektor migas maupun di luar migas. Pada sektor migas melihat perkembangan di pasaran dunia Internasional tampaknya minyak bumi tidak lagi menjadi primadona dikarenakan harga yang cenderung menurun di pasaran Internasional. Persaingan antara negara-negara produsen minyak bumi di negara-negara yang tergabung OPEC maupun di luar OPEC membuat persediaan minyak bumi di pasaran Internasional berlimpah sementara permintaan cenderung lebih sedikit. Melihat gejala ini, maka penerimaan dari sektor non migas harus lebih digalakkan lagi seperti penerimaan dari pajak, sektor jasa, hasil hutan dan perkebunan. Dengan semakin meningkatnya pendapatan dari sektor non migas akan meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk proses pembangunan yang akan mengurangi tingkat ketergantungan pada bantuan luar negeri.

Selain itu, fluktuasi kurs juga turut berperan dalam perekonomian Indonesia. Dengan sistem kurs mengambang yang sangat rentan terhadap perubahan nilai tukar mata uang kuat dunia akan memberikan efek yang berarti.

Sementara itu pengeluaran pembangunan harus lebih selektif, diprioritaskan pada proyek-proyek terutama yang menunjang upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta yang berorientasi ekspor sehingga dapat membantu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Proyek-proyek mercu suar seperti proyek dibidang militer sebaiknya dikurangi porsinya karena hanya akan membebani pemerintah dengan hutang baru sementara pemasukan dari proyek tersebut dalam jangka pendek hampir tidak ada.

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesa merupakan anggapan sementara yang diutarakan oleh seseorang mengenai suatu objek yang menjadi bahan penelitian yang dianggap benar meskipun pendapat tersebut belum dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disusun hipotesa sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh yang signifikan dan negatif dari tingkat tabungan pemerintah terhadap hutang luar negeri. Hal ini berarti jika tingkat tabungan pemerintah mengalami peningkatan, maka hutang luar negeri akan mengalami penurunan.
2. Adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari tingkat pengeluaran pembangunan terhadap hutang luar negeri. Hal ini berarti jika tingkat pengeluaran pembangunan semakin meningkat sementara pembiayaan yang berasal dari potensi dalam negeri belum tergali, maka pemerintah

akan membiayai pengeluaran pembangunan melalui pos bantuan/pinjaman sehingga akan meningkatkan hutang luar negeri.

3. Adanya pengaruh yang signifikan dan negatif dari pendapatan sektor minyak bumi dan gas terhadap hutang luar negeri. Hal ini berarti jika pendapatan dari sektor minyak bumi dan gas mengalami peningkatan, maka akan mengurangi tingkat hutang luar negeri.
4. Adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari kurs dolar terhadap hutang luar negeri. Hal ini berarti jika kurs dolar mengalami peningkatan maka akan berakibat hutang luar negeri Indonesia akan meningkat.
5. Adanya pengaruh yang signifikan dari variabel tabungan pemerintah, pengeluaran pembangunan, penerimaan minyak bumi dan gas serta kurs rupiah terhadap dolar secara bersama-sama terhadap variabel hutang luar negeri Indonesia.

1.7. Metodologi Penelitian

Sejalan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah dan beberapa tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan digunakan studi pustaka dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti : nota keuangan, laporan Bank Indonesia, Statistik Indonesia, Internasional Monetary Funds dan World Bank. Adapun metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah deret berskala (*time series*) dari tahun 1983 – 2001.

1.7.1. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data dalam laporan ini untuk mencapai tujuan penelitian dan menguji hipotesa, penulisan menggunakan dua macam metode, yaitu:

1.7.1.1. Metode Kualitatif

Yaitu metode yang berdasarkan pada analisa variabel-variabel yang tidak dapat diukur atau menggunakan analisa yang sifatnya menguraikan dalam bentuk kalimat.

1.7.1.2. Metode Kuantitatif

Yaitu metode analisa data dengan menguji dan menilai data yang terkumpul dengan menggunakan rumus-rumus yang diambil dari buku teks yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Adapun rumusan-rumusannya adalah:

1. Model Dasar

$$HLN = f(TB, PP, PMG, K)$$

Keterangan:

HLN = Hutang luar negeri Indonesia (milyar Rp)

TB = Tabungan pemerintah (milyar Rp)

PP = Pengeluaran pembangunan (milyar Rp)

PMG = Penerimaan Minyak Bumi dan Gas (milyar Rp)

K = Kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika (Rp/\$)

2. Model Persamaan

Model persamaan yang digunakan adalah model non linier. Hal ini dikarenakan jika diagram sebaran (*scatter plot*) menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan independen secara diagonal maka persamaan yang digunakan adalah bentuk logaritma yang dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{LHLN} = \beta_0 + \beta_1 \text{LTB} + \beta_2 \text{LPP} + \beta_3 \text{LPMG} + \beta_4 \text{LK} + e$$

Keterangan:

LHLN = Hutang luar negeri Indonesia (milyar Rp)

LTB = Tabungan pemerintah (milyar Rp)

LPP = Pengeluaran pembangunan (milyar Rp)

LPMG = Penerimaan Minyak Bumi dan Gas (milyar Rp)

LK = Kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika (Rp/\$)

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_4$ = Koefisien regresi masing-masing variabel

e = Variabel pengganggu

L = Logaritma

3. OLS (*Ordinary Least Square*) atau Regresi

Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan suatu variabel dependen terhadap suatu

atau lebih variabel independen yang berguna untuk mengestimasi atau meramalkan nilai rata-rata populasi variabel dependen berdasarkan nilai tetap variabel independen.³⁾

Variabel tersebut ada dua macam, yaitu variabel dependent atau variabel terikat dan variabel independen atau variabel bebas. Dimana variabel dependennya adalah hutang luar negeri, sedangkan variabel independennya adalah tabungan pemerintah, pengeluaran pembangunan, penerimaan minyak bumi dan gas, serta kurs rupiah terhadap dollar Amerika.

1.8. Pengujian Hipotesa

1.8.1. Pengujian Ketetapan Model (Penduga Parameter Bersama-sama)

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} pada derajat kebebasan tertentu.

Hipotesa yang diajukan:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0 \rightarrow$ secara bersama-sama variabel Independen tidak mempengaruhi hutang luar negeri pemerintah Indonesia.

³⁾ Damodar Gujarati, *Ekonometrika Dasar*, Erlangga, Jakarta, 1995, hal. 14

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0 \rightarrow$ secara bersama-sama variabel Independen mempengaruhi hutang luar negeri pemerintah Indonesia.

Apabila :

$F_{hitung} < F_{tabel} (F \{k - 1, n - k\}) \rightarrow H_0$ diterima

$F_{hitung} > F_{tabel} (F \{k - 1, n - k\}) \rightarrow H_0$ ditolak

Keterangan:

k = jumlah koefisien variabel independen

n = jumlah pengamatan

Bila H_0 ditolak, modal tersebut tepat untuk dijadikan model penduga parameter dari persamaan.

1.8.2. Pengujian terhadap Penduga Parameter Individual

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel-variabel penjelas terhadap variabel tidak bebasnya secara individual.

Hipotesa yang diajukan:

Jika negatif, maka :

$H_0 : \beta_{1,3} > 0 \rightarrow$ Variabel Independen berpengaruh positif.

$H_a : \beta_{1,3} < 0 \rightarrow$ Variabel Independen berpengaruh negatif.

Jika positif, maka :

$H_0 : \beta_{2,4} < 0 \rightarrow$ Variabel Independen negatif terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_{2,4} > 0 \rightarrow$ Variabel Independen positif terhadap variabel dependen.

Dengan menggunakan tabel t-statistik, maka

Apabila digunakan uji t-statistik satu arah:

$t_{hitung} < t \{ \alpha, n - k \} \rightarrow$ Ho diterima

$t_{hitung} > t \{ \alpha, n - k \} \rightarrow$ Ho ditolak

Keterangan:

$\beta_1, \dots, \beta_4 =$ koefisien regresi masing-masing variabel penjelas

$k =$ jumlah koefisien variabel penjelas

$n =$ jumlah pengamatan

Bila Ho ditolak berarti variabel independen secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Dan sebaliknya, bila Ho diterima berarti variabel independen tidak signifikan (tidak berpengaruh) terhadap variabel dependennya.

1.8.3. Pengujian terhadap Koefisien Determinan Majemuk (R^2)

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebaikan suatu garis regresi yang dicocokkan terhadap sekumpulan data. Koefisien determinan majemuk (R^2) merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data. Secara verbal, R^2 mengukur proporsi (bagian) atau prosentase total variasi dalam Y yang dijelaskan oleh model regresi.

Dua sifat koefisien determinan majemuk (R^2):⁴⁾

- a. R^2 merupakan besaran positif
- b. Batasannya adalah $0 < R^2 < 1$. Suatu R^2 sebesar satu (1) berarti suatu kecocokan sempurna. Sedangkan R^2 yang bernilai nol (0) berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

R^2 sama dengan satu (1), berarti garis regresi yang dicocokkan menjelaskan 100% variasi dalam Y. Sebaliknya, kalau R^2 sama dengan nol (0) model tadi tidak menjelaskan sedikitpun variasi dalam Y. Tetapi khasnya R^2 terletak antara kedua ekstim ini. Kecocokan model dikatakan “lebih baik” kalau R^2 semakin mendekati satu (1).⁵⁾

1.8.4. Pengujian Asumsi Klasik

- a. Pengujian Multikolinieritas

Pengujian terhadap multikolinieritas dapat dilakukan dengan menguji keterkaitan antar variabel independen. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat R^2 .

- b. Pengujian Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian Glesjer. Pengujian tersebut hanya membandingkan antara nilai t_{tabel} dan t_{hitung} .

- c. Pengujian Autokorelasi

⁴⁾ Damodar Gujarati, *Ibid*, Hal. 44 – 45

⁵⁾ *Ibid*, Hal. 98 – 99

Pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat nilai Dubin Watson (DW).

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesa penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang pengertian atau teori-teori mengenai hutang luar negeri, definisi antar variabel, jenis-jenis hutang luar negeri pemerintah, indikator hutang luar negeri, teori akumulasi hutang luar negeri, serta faktor-faktor yang menyebabkan berakumulasi hutang luar negeri dari hasil penelitian terdahulu.

BAB III GAMBARAN UMUM

Sejarah timbulnya hutang luar negeri Indonesia, arah umum kebijakan pemanfaatan hutang luar negeri, hutang luar negeri sebagai bagian dari APBN, perkembangan hutang luar negeri Indonesia, penyelesaian hutang luar negeri swasta.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data, analisa data, interpretasi koefisien masing-masing variabel independen, pengujian statistik, pengujian hipotesis, pengujian asumsi klasik.

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari analisa penelitian ini dan implikasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki permasalahan hutang luar negeri Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian dan Fungsi Pinjaman Luar Negeri

Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1969/1970 – 1993/1994), Pedoman Pembangunan Nasional dalam APBN menunjukkan bahwa negara kita masih belum mampu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Sejarah mencatat bahwa negara yang tidak mempunyai tingkat tabungan dalam negeri yang memadai untuk membiayai pertumbuhan ekonomi, umumnya menutup kesenjangan pembiayaan dengan mencari sumber-sumber yang berasal dari luar negeri. Dengan demikian tidak mengherankan apabila terjadi aliran arus modal dari negara industri ke negara-negara sedang berkembang.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi, suatu negara memerlukan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan, sumber penerimaan negara yang berasal dari pinjaman dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pinjaman dalam negeri (*Internal debt*) dan pinjaman yang berasal dari luar negeri (*eksternal debt*).

Pinjaman luar negeri berupa pinjaman yang berasal dari suatu negara secara bilateral atau lembaga-lembaga keuangan, baik regional maupun Internasional. Pinjaman pemerintah sesuai dengan prinsip APBN ditetapkan sebagai dana pelengkap pembangunan untuk menutup kesenjangan anggaran. Oleh karena itu dalam melakukan pinjaman, pemerintah mengupayakan

pinjaman yang berasal dari sumber-sumber resmi atau *Official Development Assistance* (ODA). Dana ini mempunyai syarat-syarat yang lunak (*soft loan*) dan masa pengembalian yang relatif lebih panjang dibandingkan dana komersial yang berasal dari sumber lain. Bantuan resmi ini merupakan salah satu bentuk pengolahan dana yang berasal dari negara-negara maju sebagai dana donor kepada negara-negara berkembang sebagai penerima bantuan.

Pembiayaan pembangunan dari sumber luar negeri sebenarnya sangat rentan dilihat dari pengamanan APBN, sebagaimana kita ketahui bahwa sistem APBN kita menganut sistem anggaran berimbang, yakni menutup kesenjangan anggaran dari sumber luar negeri, sementara nilai tukar internasional senantiasa bergejolak sebagaimana naik turunnya perekonomian internasional.

Di tinjau dari perspektif teori, hutang luar negeri Indonesia terbentuk berdasarkan tarikan dan desakan.⁶⁾ Teori yang berdasarkan tarikan disebut teori tarikan hutang (*loan pull theory*) dan yang berdasarkan desakan hutang (*loan-push theory*).

Teori tarikan hutang dipelopori oleh Hallberg (1989). Sedangkan teori desakan hutang telah dikemukakan oleh Mandel (1986) dan juga oleh Darity dan Horn (1988).

Berdasarkan teori tarikan hutang, permintaan akan pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara berkembang dapat digolongkan dalam dua kategori. Kategori pertama ialah permintaan

⁶⁾ Sritua Arief, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia*, Zaman, Jakarta, September 1997, hal 123

pinjaman yang betul-betul dilandasi oleh perhitungan ekonomi yang matang dan jelas terkait dengan proses peningkatan kapasitas produksi nasional. Kategori kedua ialah permintaan pinjaman luar negeri yang ditentukan oleh faktor-faktor random. Faktor-faktor ini erat kaitannya dengan perilaku elit kekuasaan di negara-negara berkembang, yaitu perilaku yang korup yang bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi nasional terutama sumber-sumber Internasional dalam rangka pinjaman luar negeri. Proyek-proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri yang ditentukan oleh faktor-faktor random seperti ini banyak tidak punya kaitan dengan peningkatan kapasitas produksi nasional. Skala pinjaman jauh melebihi keperluan yang realistis sehingga *rate of return* dana pinjaman berada jauh dibawah *cost of borrowing*, hal ini terjadi apabila ada yang dapat dikaitkan dengan peningkatan kapasitas produksi nasional.

Selain faktor-faktor random yang tersebut diatas ada lagi dua faktor random yang lain yang turut menentukan pinjaman luar negeri sektor pemerintah. Kedua faktor random ini masing-masing adalah faktor kebutuhan untuk mempertahankan nilai tukar yang relatif tinggi (*overvalued currency*) sehingga impor barang konsumsi meningkat dan faktor kebutuhan untuk mempertahankan cadangan devisa yang relatif tinggi. Pinjaman luar negeri untuk membiayai kedua kebutuhan ini jelas tidak menjurus kepada peningkatan kapasitas produksi nasional.

Teori desakan hutang terdiri dari dua eksposisi. Eksposisi yang pertama diformulasikan oleh Darity dan Horn mengemukakan bahwa peningkatan akumulasi hutang luar negeri pada sebagian negara berkembang secara substansial banyak diakibatkan oleh dorongan yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan Internasional yang menguasai surplus petrodolar. Surplus petrodolar ini terpaksa dengan berbagai upaya dan cara dilempar ke negara-negara maju. Pelemparan dana petrodolar ini dikenal dalam dunia keuangan internasional sebagai proses *recycling of petrodollars*.

Dalam proses seperti ini, banyak proyek ekonomi di negara-negara sedang berkembang secara perhitungan ekonomis tidak dapat dipertanggung jawabkan. Kolaborasi antara pihak kreditor dengan pejabat-pejabat pemerintah sering terjadi sehingga objektivitas mengenai kelayakan ekonomis proyek-proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri melalui mekanisme yang direayasa oleh pihak loan pusher, banyak yang tidak didukung oleh justifikasi ekonomis. Akibatnya, kaitan yang jelas antara pinjaman yang diterima dengan peningkatan kapasitas produksi nasional lemah sekali dan seringkali mengakibatkan terjadinya manipulasi nilai proyek.

Eksposisi yang kedua telah dikemukakan oleh Ernest Mandel yang menyatakan bahwa berakumulasinya hutang luar negeri negara berkembang merupakan manifestasi yang spesifik dari *overheating of credit* yang terjadi di negara-negara kapitalis maju. Menurut Mandel, proses *overheating of credit* ini perlu dilaksanakan oleh negara-negara kapitalis maju demi

mencegah terjadinya krisis dalam sistem kapitalisme di negara-negara ini setelah melihat kembali adanya gejala-gejala resesi yang berkepanjangan. Pelemparan dana pinjaman ke negara-negara berkembang adalah dalam rangka menstimulir proses pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju ini.

2.2. Teori Akumulasi Hutang Luar Negeri⁷⁾

Akumulasi hutang luar negeri merupakan jumlah stok hutang luar negeri pada akhir tahun dan jumlah kewajiban pembayaran yang belum dilunasi serta ditambah jumlah pinjaman baru yang digunakan untuk menutupi devisa neraca pembayaran pada neraca pembayaran.

Bentuk persamaan dari akumulasi hutang luar negeri, sebagai berikut:

$$H_t = (1 + i) H_{t-1} + (M_t - X_t)$$

Keterangan : H = jumlah hutang luar negeri

t = waktu

i = tingkat suku bunga pinjaman

X = ekspor

M = impor

Persamaan diatas menunjukkan bahwa stok hutang luar negeri pada tahun tertentu (H_t) adalah sebesar stok hutang luar negeri pada tahun lalu (H_{t-1}) ditambah dengan jumlah kewajiban pembayaran bunga yang belum dilunasi ($i \cdot H_{t-1}$) ditambah dengan jumlah pinjaman baru pada tahun bersangkutan yang digunakan untuk menutupi defisit transaksi berjalan

⁷⁾ Deny S, *Catatan Akumulasi Hutang Luar Negeri Indonesia*, Yogyakarta, 1992, hal. 86

($X < M$). Naiknya defisit neraca berjalan akan menaikkan jumlah hutang luar negeri.

Dari persamaan akumulasi hutang luar negeri tersebut dapat diketahui indikator beban hutang luar negeri suatu negara dengan membandingkan antara jumlah stok dengan nilai ekspor dan impor negara tersebut.

$$\frac{H_t}{X_t} = \frac{(1-i)H_{t-1}}{X_t} + \frac{(M_t - X_t)}{X_t}$$

Jumlah nilai ekspor tahun ini (X_t) adalah sama dengan jumlah ekspor tahun lalu (X_{t-1}) ditambah dengan perubahan nilai ekspor yang terjadi pada tahun ini ($s \cdot X_{t-1}$) atau dapat dirumuskan:

$$X_t = (X_{t-1}) + (s \cdot X_{t-1}), \text{ dengan demikian maka dapat diperoleh bentuk}$$

persamaan yaitu sebagai berikut:

$$\frac{H_t}{X_t} = \frac{(1-i)H_{t-1}}{(1+s)H_{t-1}} + \frac{M_t - X_t}{X_t}$$

Dimana: $\frac{(1+i)H_{t-1}}{(1+s)H_{t-1}} = \text{Hutang luar negeri Riil}$

$$\frac{M_t - X_t}{X_t} = \text{Hutang luar negeri Potensial}$$

2.3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Berakumulasinya Hutang Luar Negeri⁸⁾

2.3.1. Defisit Perkiraan Berjalan dalam Neraca Pembayaran

Pada umumnya negara-negara berkembang mengalami defisit perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran. Oleh karena itu, tanpa

memperhitungkan pembayaran bunga hutang luar, posisi perkiraan berjalan tetap negatif, maka sebagai pembayaran bunga hutang luar negeri dan keseluruhan cicilan pokok hutang luar negeri terpaksa ditutupi dengan hutang baru dan penggunaan cadangan devisa nasional melalui perkiraan modal.

Selama periode 1973 – 1993, nilai komulatif defisit perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran Indonesia adalah sekitar US\$ 37 milyar.⁹⁾

Pembayaran bunga hutang luar negeri dan keuntungan investasi asing yang direpatriasi ke luar negeri adalah dua komponen utama yang menyebabkan defisit ini. Hutang baru yang masuk ke Indonesia terdiri dari sumber-sumber riil dan sumber-sumber keuangan yang liquid. Sebagian besar dana liquid yang diterima telah masuk ke dalam cadangan devisa nasional sebagai pengganti yang sudah digunakan sehingga dalam cadangan devisa nasional ada komponen yang berbentuk hutang luar (*borrowed eserve*).

Ini bermakna bahwa Indonesia berada dalam posisi yang mengorbankan sumber-sumber riil masa depan dalam melakukan pembayaran beban hutang luar negerinya.

⁸⁾ Sritua Arief, *op.cit.*, hal. 127

⁹⁾ World Bank, 1992, 1994

2.3.2. Net Trasfer

Posisi netto yang negatif terjadi sebagai akibat lebih besarnya nilai pembayaran kewajiban hutang luar negeri (bunga plus cicilan pokok) dibandingkan dengan nilai hutang yang baru masuk. Selisih ini membentuk net transfer. Nilai net transfer ini sungguh pasif sehingga sangat berdampak negatif terhadap posisi keuangan Internasional negara-negara penghutang di dunia ketiga.

Di Indonesia, data net transfer sektor pemerintah telah menunjukkan nilai sebesar US\$ 7,8 milyar untuk periode 1985 – 1993. Sebagai akibat adanya net transfer ini yang erat kaitannya dengan ketidakmampuan perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran untuk membiayai pembayaran kewajiban hutang luar negeri, maka timbullah apa yang disebut situasi fisher paradox (Fisher, 1933).

Studi Sarkar (1991) yang mencakup 16 negara (termasuk Indonesia) menunjukkan mengenai merosotnya nilai satuan dan nilai tukar keseluruhan produk ekspor dan produk manufaktur negara-negara yang diteliti selama periode awal 1980 hingga menjelang 1990. Fisher Paradox mengemukakan bahwa negara-negara berkembang penghutang besar yang terpaksa melakukan net transfer yang diakibatkan oleh merosotnya daya beli penerimaan ekspornya mengalami situasi yang menunjukkan bahwa semakin besar cicilan

pokok hutang luar negeri yang telah dibayarkan negara-negara ini, semakin besar pula nilai hutang luar negeri yang menumpuk.

Situasi Fisher Paradox di Indonesia menunjukkan peningkatan cicilan pokok hutang luar negeri sektor pemerintah (hutang jangka menengah dan panjang) yang secara kumulatif telah mencapai angka US\$ 41,4 milyar selama periode 1980 – 1993. Selama periode yang sama sektor pemerintah telah menambah hutang jangka menengah dan panjang sebesar US\$ 69,4 milyar.

2.3.3. Pelarian Modal

Pelarian modal juga merupakan faktor yang telah menyebabkan meningkatnya akumulasi hutang luar negeri negara-negara berkembang. Pelarian modal terpaksa dibiayai oleh hutang luar negeri oleh karena ini menimbulkan posisi yang timpang pada perkiraan modal dalam neraca pembayaran sedangkan neraca pembayaran harus diseimbangkan. Studi yang telah dilakukan oleh Morgan Guaranty Trust Company (1986) yang mencakup 18 negara berkembang (termasuk Indonesia) mengemukakan bahwa selama periode 1975 – 1986 telah terjadi pelarian modal dari negara-negara ini sebesar US\$ 198 milyar yang diiringi dengan peningkatan hutang luar negeri negara-negara ini sebesar US\$ 451 milyar. Situasi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut sebesar 44% dari

pertambahan hutang luar negeri negara-negara ini telah digunakan untuk membiayai pelarian modal.

Dengan meneliti pos aliran masuk modal swasta (yang umumnya bersifat jangka pendek untuk memanfaatkan tingkat bunga yang menarik di Indonesia) dan pos "*net errors and omissions*" dalam data neraca pembayaran, telah diperkirakan adanya pelarian modal dari Indonesia selama periode 1970 – 1980 sebesar US\$ 9,4 milyar atau rata-rata hampir sebesar US\$ 1 milyar per tahun dan selama periode 1988 – 1991 pelarian modal telah ditaksir sebesar US\$ 11,17 milyar atau sebesar US\$ 3,7 milyar rata-rata per tahun.

Pelarian modal oleh pihak swasta menimbulkan dampak negatif terhadap distribusi kekayaan dan pendapatan. Ini menimbulkan konsekuensi negatif oleh karena sebagai akibat pelarian modal yang dibiayai hutang luar negeri, rakyat menjadi penanggung beban hutang luar negeri sementara pihak-pihak yang melarikan modal dan mempertahankan aset di luar negeri bebas dari beban ini. Terjadilah proses sosialisasi beban hutang luar negeri secara tidak wajar dengan rakyat banyak sebagai pemikul beban utama. Proses sosialisasi beban hutang luar negeri ini dibarengi dengan proses privatisasi pemupukan aset di luar negeri.

2.3.4. Perubahan Kurs Mata Uang

Membengkaknya akumulasi hutang luar negeri Indonesia sejak tahun 1980 juga banyak diakibatkan oleh perubahan kurs mata uang yen terhadap dollar Amerika Serikat. Menurunnya nilai dollar Amerika Serikat terhadap Yen telah memperbesar nilai hutang luar negeri Indonesia yang berbentuk Yen diukur dalam nilai dolar Amerika Serikat dalam hubungannya dengan nilai Yen. Seperti diketahui, komposisi hutang luar negeri Indonesia terdiri sekitar 40% dalam bentuk mata uang Yen, yaitu hutang luar negeri yang berasal dari Jepang.

Menurut RAPBN 1993/1994 cicilan hutang yang harus kita bayar adalah US\$ 3 milyar.¹⁰⁾ Angka ini diturunkan dari seluruh cicilan hutang pada tahun anggaran tersebut, yang diproyeksikan sekitar US\$ 7,5 milyar. Dalam tahun 1993, kita perkirakan tingkat apresiasi Yen terhadap dolar mencapai 10%. Dengan demikian, kewajiban mencicil hutang terhadap Jepang kini menjadi US\$ 3,3 milyar atau Rp 600 milyar.

Sementara itu, jika menghitung dengan basis rupiah, akan didapat hasil yang berbeda. Dalam satu tahun, apresiasi yen terhadap rupiah diperkirakan 15%. Cicilan hutang yang semula Rp 6 triliun (ekuivalensi dari US\$ 3 milyar), maka akan membengkak menjadi Rp 6,9 triliun. Ini artinya ada pembengkakan pembayaran hutang

¹⁰⁾ A. Tony Prasetyantono, "Eliminasi 'Yendaka': Siapa yang Dimuntungkan?", Agenda Ekonomi Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 427.

sebesar Rp 900 milyar. Kedua perhitungan tersebut berbeda karena adanya perbedaan antara laju inflasi di Indonesia, Jepang dan AS yang menyebabkan tingkat apresiasi (dan sebaliknya depresiasi) yang berbeda, diantara tiga mata uang (rupiah, yen, dollar AS). Faktor ini masih ditambah dengan unsur subyektifitas masing-masing Bank Sentral dalam menentukan kurs mata uangnya. Biasanya hal ini disesuaikan dengan kepentingan nasional, atau konteks perdagangan Internasional masing-masing negara.

Namun, karena harus membayar hutang dengan valuta asing dan tidak dengan rupiah, maka perhitungan pertama menjadi lebih relevan. Dengan kata lain, kerugian karena adanya apresiasi yen diperkirakan sekitar US\$ 0,3 milyar atau Rp 600 milyar.

Indonesia sudah menjadi “langganan” dampak kenaikan yen. Tapi kali ini dampaknya paling parah. Sekitar US\$ 35 milyar hutang pemerintah dalam mata uang yen.¹¹⁾ Hanya dalam waktu satu bulan, antara 9 Maret dan 11 April kemarin, kurs dollar terhadap yen anjlok dari 88,75 yen menjadi 82 yen. Tanpa adanya penambahan hutang baru, nilai buku hutang pemerintah dalam sekejap melonjak dengan US\$ 2,7 milyar. Dan kalau kurs yen tak turun, dari kenaikan ini saja pemerintah harus mengeluarkan tambahan pengeluaran bunga sebesar US\$ 133 juta.

¹¹⁾ Winarno Zein, “*Fenomena Yen*”, *Upaya Memperkuat Rupiah*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998, hal 124

2.4. Teori Kesenjangan antara Tingkat Tabungan dan Investasi (*Investment Saving Gap*)

Pada tahun-tahun terakhir ini timbul fenomena baru di negara-negara sedang berkembang (terutama di negara-negara penghutang besar) untuk mulai pengalihan perhatian kepada bentuk alternatif bagi pembiayaan pembangunan yang berasal dari pihak asing. Dengan perkataan lain telah timbul kecondongan kebijaksanaan untuk mengurangi porsi hutang luar negeri dan memperbesar porsi bentuk-bentuk pembiayaan jenis lainnya.

Adapun bentuk-bentuk alternatif pembiayaan yang berasal dari pihak-pihak asing antara lain adalah investasi asing secara langsung (*foreign direct investment*), project lending, porto-folio investment, closed-end equity funds, quasi-equity contracts, private non quarated debt dan licensing. Di antara bentuk-bentuk alternatif ini yang paling menonjol adalah investasi asing secara langsung baik yang bersifat penuh maupun yang bersifat patungan.

Ada tiga alasan mengapa sumber alternatif pembiayaan pembangunan mulai digalakkan, yaitu:

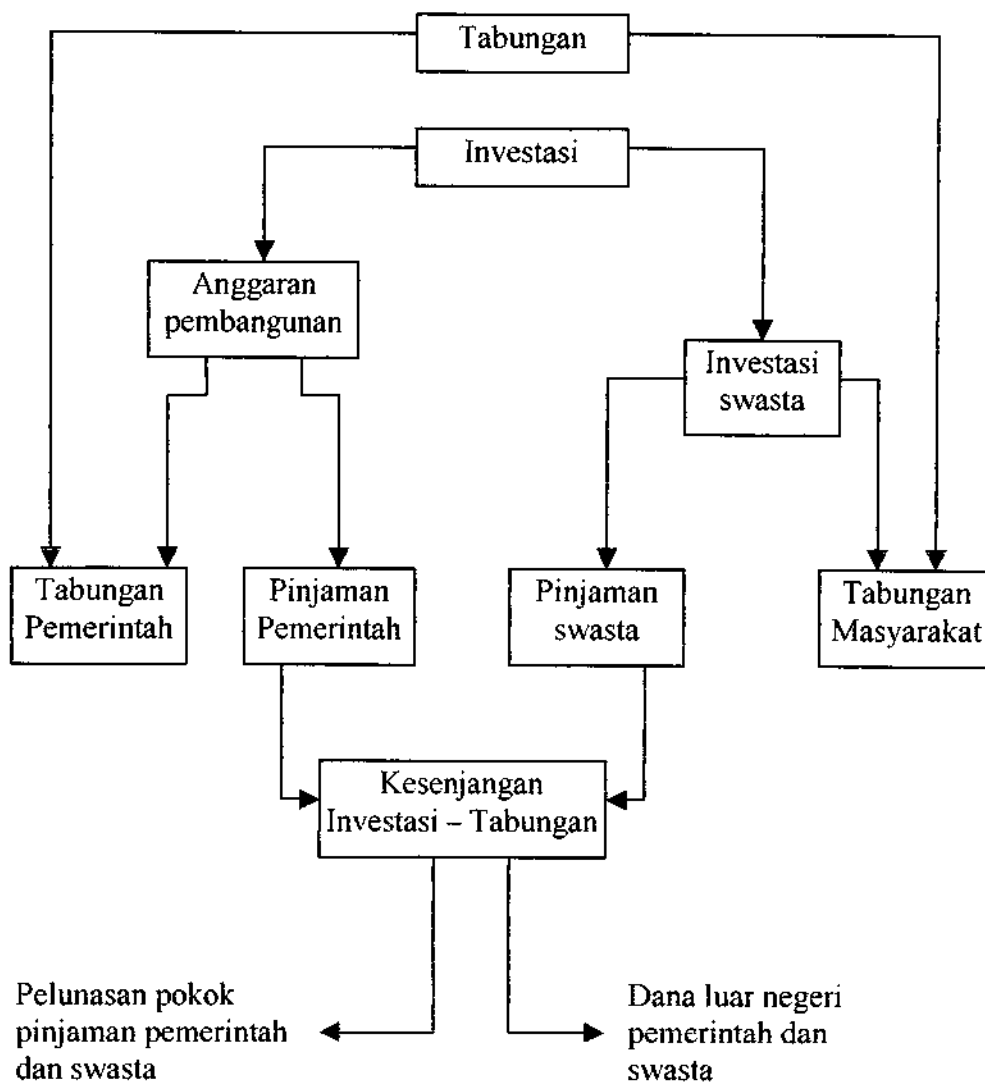
- Adanya posisi defisit perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran yang berlangsung secara terus-menerus.
- Adanya posisi netto yang negatif dalam aliran masuk sumber-sumber keuangan internasional di sektor pemerintah
- Adanya pelarian modal dari nilai yang pasif secara terus-menerus.

Keseluruhan situasi krisis dalam neraca pembayaran tersebut menyebabkan terjadinya situasi investment saving gap. Terjadi kesenjangan

terus menerus antara kebutuhan investasi nasional dengan kemampuan tabungan nasional untuk membiayai kebutuhan investasi nasional ini. Bila dilihat dari teori kesenjangan antara tingkat tabungan dan investasi (*resource gap*) yaitu terjadinya defisit terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan karena tabungan lebih kecil daripada kebutuhan untuk investasi.

Gambar 2.1

Skema Kesenjangan antara Investasi dengan Tabungan



Dari skema diatas, dapat diuraikan bahwa kebutuhan investasi dipergunakan untuk memenuhi anggaran pembangunan dan keperluan investasi swasta.¹²⁾

Kebutuhan ini dibiayai dengan tabungan pemerintah, karena belum mencukupi maka ditutup dengan pinjaman (hutang) pemerintah atau dapat ditutup dengan tabungan masyarakat. Tapi hal ini belum mencukupi juga sehingga dibantu dengan pinjaman swasta. Pinjaman pemerintah bersama-sama dengan pinjaman swasta inilah yang merupakan kesenjangan antara investasi dengan tabungan.

Untuk menutupi besarnya kesenjangan diatas, suatu target pertumbuhan ekonomi ditetapkan bersama-sama dengan rasio modal output tertentu. Sehingga kesenjangan ini timbul bila laju tabungan dalam negeri lebih kecil daripada investasi yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.

Harrod – Domar dalam model pertumbuhannya berpangkal pada berlakunya asas pelipatgandaan investasi yaitu pertumbuhan pada permintaan adalah sama dengan penambahan investasi dikalikan dengan multipliernya, sedangkan pertumbuhan pada kapasitas produksi adalah sama dengan investasi dibagi oleh *capital output-ratio* (Jhingan, 1994 : 293). Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan persentase kenaikan pendapatan yang tergantung dari besarnya kecenderungan masyarakat untuk menabung (MPS) dengan ICOR, sehingga dituntut dengan tingkat tabungan

¹²⁾ Bambang Sulistiono, *Peranan Hutang Luar Negeri Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Buletin Ekonomi UPN, Tahun 11, No.6, Yogyakarta, Desember, 1998, Hal. 58

yang tinggi untuk membiayai kebutuhan investasi tersebut, karena tabungan sendiri dianggap masih belum mencukupi kebutuhan maka diambilkan dari hutang luar negeri.

2.5. Klasifikasi Hutang Luar Negeri

Hutang atau pinjaman luar negeri dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

2.5.1. Hutang Luar Negeri Berdasarkan Jangka Waktu Pengembaliannya

a. Hutang Jangka Pendek (*Short Term Debt*)

Hutang luar negeri yang memiliki batas waktu pengembalian kurang dari satu tahun. Umumnya informasi yang tepat tentang penggunaannya tidak tersedia secara luas dari negara debitur.¹³⁾ Oleh karena itu hutang jenis ini sulit untuk dimonitor.

b. Hutang Jangka Panjang (*Long Term Debt*)

Hutang luar negeri yang memiliki batas jangka waktu pengembalian lebih dari satu tahun dan diberikan kepada bukan penduduk dan pengembaliannya atau pembayarannya dapat dalam bentuk mata uang lain, barang-barang dan jasa.

Hutang jangka panjang terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- *Public Debt* (Hutang Publik) yaitu obligasi eksternal dari negara pengutang baik dari sektor pemerintah termasuk

¹³⁾ World Bank, *External Debt of Development Countries*, Washington DC, 1990 – 1991, hal. 10

pemerintah nasional, sub divisi politik, ataupun badan atau lembaga pemerintah otonom.

- *Publicly Guaranteed Debt* (Hutang yang dijamin oleh pemerintah) yaitu obligasi eksternal dari suatu negara pengutang sektor swasta yang dijamin pembayarannya oleh pemerintah.
- *Private Non Guaranteed Eksternal Debt* (Hutang sektor swasta yang tidak dijamin) yaitu obligasi eksternal dari negara pengutang sektor swasta yang tidak dijamin pembayarannya oleh pemerintah.

2.5.2. Hutang Luar Negeri Berdasarkan Negeri Pemberi

a. Official Creditors

- Pinjaman Multilateral atau pinjaman yang berasal dari organisasi keuangan internasional.
- Pinjaman Bilateral (pinjaman dari pemerintah) yaitu pinjaman dari bank-bank sentral, badan atau lembaga otonomi dan pinjaman langsung dari lembaga kredit ekspor resmi.

b. Private Creditors

- Suppliers, yaitu pinjaman dari pabrik atau eksportir barang
- Pasar finansial, yaitu pinjaman dari bank-bank swasta dan lembaga-lembaga keuangan swasta yang berupa surat berharga (*Bonds*)

- Pinjaman lain, yaitu pinjaman luar negeri akibat dilaksanakannya nasionalisasi kekayaan dan tidak dikategorikan sebagai *private creditors*.

2.5.3. Bantuan Luar Negeri yang lainnya

a. Bantuan Khusus

Bantuan khusus adalah jenis hutang lunak yang fleksibel penggunaannya atau tidak terikat pada proyek-proyek tertentu. Karena tidak terikat maka bantuan khusus dapat berfungsi sebagai:¹⁴⁾

- Memperkuat cadangan devisa
- Membiayai impor
- Membayar pajak
- Mengangsur hutang luar negeri

Kriteria pemberian bantuan khusus ini oleh Bank Dunia adalah dengan melihat pada fenomena perekonomian suatu negara. Bila semakin baik perekonomian suatu negara maka Bank Dunia akan mengurangi jumlah bantuan khususnya. Dan begitu juga sebaliknya bila perekonomian suatu negara semakin turun maka Bank Dunia akan menaikkan jumlah bantuan khususnya.

¹⁴⁾ A. Toni Prasentiantono, op.cit., hal. 175

b. Pinjaman Siaga (*standby loan*)

Pinjaman siaga adalah pinjaman yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank komersial internasional untuk tujuan berjaga-jaga. Fungsi pinjaman siaga ini untuk berjaga-jaga terhadap gejolak kebutuhan devisa ataupun fluktuasi yang sifatnya ringan. Tingkat suku bunganya adalah tingkat suku bunga komersil, diatas tingkat suku bunga LIBOR (*London Interbank Offered Rate*) atau SIBOR (*Singapore Interbank Offered Rate*) maupun tingkat suku bunga pinjaman lunak seperti CEI. Bila pada masa jatuh tempo pinjaman tersebut tidak digunakan maka pengembalian pinjaman disertai dengan membayar *commitment fee*. Dan bila pinjaman tersebut digunakan maka pengembaliannya disertai dengan bunga pinjaman.

2.5.4. Pengelompokkan Hutang Luar Negeri oleh Sektor Pemerintah

a. *Debt Outstanding (Including Undisbursed)*

Adalah penjumlahan antara hutang yang telah dicairkan dan yang belum dicairkan yang menunjukkan total hutang yang masih beredar dari negara peminjam pada akhir tahun.

b. *Debt Outstanding (Disbursed Only)*

Merupakan total hutang yang masih beredar dari negara peminjam pada akhir tahun.

c. *Commitments*

Merupakan total dari pinjaman-pinjaman dimana perjanjian telah disepakati pada akhir tertentu.

d. *Disbursements*

Menggambarkan pinjaman-pinjaman yang masih beredar yang telah disepakati selama tahun tertentu.

e. *Service Payment*

Merupakan pembayaran terhadap cicilan hutang pokok dari bunga yang dinyatakan dalam mata uang asing, barang-barang atau jasa pada periode tertentu.

f. *Net Flow*

Merupakan disbursements (hutang yang telah dicairkan) dikurangi dengan cicilan pokok.

g. *Net Transfer*

Merupakan net flow dikurangi dengan pembayaran bunga atau disbursements dikurangi dengan total debt service payment.

2.6. Indikator Hutang Luar Negeri

Penggunaan sumber dana luar negeri (hutang) dapat menimbulkan dua macam pengaruh dalam perekonomian suatu negara. Pengaruh tersebut bisa bersifat positif apabila pengelolaan hutang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan mampu mendorong atau mempercepat laju pertumbuhan

perekonomian suatu negara. Sedangkan pengaruh negatif adalah berupa kesalahan dalam pengelolaan hutang luar negeri yang tidak menunjang perkembangan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Upaya untuk mendeteksi secara dini pengaruh hutang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggunakan beberapa indikator keberadaan hutang luar negeri. Beberapa alat indikator yang umumnya digunakan oleh lembaga pembiayaan dunia, antara lain:¹⁵⁾

a. *Debt Service Ratio* (DSR)

Suatu angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah besarnya cicilan hutang ditambah dengan bunga dan jumlah ekspor suatu negara dalam periode tertentu. Besarnya angka ini sangat relatif di dalam menunjukkan apakah hutang luar negeri suatu negara dianggap sudah membahayakan ataukah masih pada tingkat yang dianggap aman. Hal ini disebabkan karena angka ini belum mencerminkan keadaan perekonomian suatu negara secara keseluruhan.

$$DSR = \frac{\text{cicilan hutang} + \text{tabungan}}{\text{total ekspor}} \times 100\%$$

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, masalah hutang luar negeri Indonesia sekarang ini sudah memasuki masa-masa kritis. Hal ini ditunjukkan dengan angka DSR (*Debt Service Ratio*) yang bekisar 31%. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar porsi penerimaan ekspor yang harus disisihkan untuk membayar kewajiban-kewajiban

¹⁵⁾ Edy Suandi Hamid, *Materi Kuliah Perekonomian Indonesia*, 1994

pembayaran hutang luar negeri, yaitu cicilan ditambah bunga.¹⁶⁾ Bank Dunia menyatakan bahwa angka DSR yang tidak melewati batas 20% dianggap aman. Dengan angka DSR diatas 31%, ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah menunjukkan indikasi taraf *over borrowing* yang membuat pemerintah sudah harus bersikap lebih hati-hati.

b. *Rule of Thumb*

Angka yang menunjukkan perbandingan antara besarnya total penerimaan ekspor tahun tertentu dikurangi besarnya cicilan hutang dan bunganya dengan total pembayaran impor masih menyisakan minimal tiga bulan pembayaran impor, maka keadaan hutang luar negeri belum dianggap membahayakan.

$$\text{ROT} = \frac{\text{Total Penerimaan Ekspor} - (\text{Cicilan Hutang} + \text{Bunga})}{\text{Total Pembayaran Impor}}$$

= minimal tiga bulan untuk pembayaran impor

c. *Debt Trap* (Perangkap Hutang)

Hal ini terjadi bila jumlah hutang baru lebih kecil dari besarnya cicilan hutang dan bunga yang harus dibayar, sehingga yang terjadi sebenarnya adalah arus modal keluar (*capital out flow*) atau jumlah hutang baru lebih kecil daripada jumlah cicilan ditambah dengan bunga.

¹⁶⁾ Sritua Arief, *op.cit.*, hal. 115